

# **REKONSTRUKSI KOMUNIKASI SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA**

**Mubin**

UIN Kalijaga Yogyakarta

email: [mubinseptspalu09@gmail.com](mailto:mubinseptspalu09@gmail.com)

## **Abstract:**

This study aims to provide an educational tool by presenting the problem of handling Covid-19 in Indonesia as well as efforts to unite the community through the reconstruction of social communication to minimize conflicts during the pandemic. The subject of this research includes the realization of the prevention of Covid-19 in Indonesia, social problems in the pandemic era, and reconstruction of social communication as an effort to prevent viruses in society. The research method used is a comparative study learning experience as a medium for data analysis with literature review. The results of this study concluded that efforts to deal with covid-19 in Indonesia were a strategic step but not yet massive so that the number of covid-19 transmissions has increased significantly. Among the causes weak regulatory discipline, covid-19 information is ambiguous and there is a prejudice oriented towards economic and political interests. These problems can be prevented by reconstructing social communication with structural, cultural, and dialogue approaches.

**Keywords:** Reconstruction, Social Communication, Covid-19 Prevention

## **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk sarana edukasi dengan menyajikan persoalan penanganan covid-19 di Indonesia serta upaya penyatuan

masyarakat melalui rekonstruksi komunikasi sosial untuk meminimalisir konflik di masa pandemi. Adapun pokok pembahasan penelitian ini meliputi, realisasi pencegahan covid-19 di Indonesia, Problematika sosial di era pandemi dan rekonstruksi komunikasi sosial sebagai upaya pencegahan virus di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparasi learning experience sebagai media analisis data dengan kajian literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan, upaya penanganan covid-19 di Indonesia merupakan langkah strategis namun belum masif sehingga jumlah penularan covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan. Diantara faktor penyebabnya; kedisiplinan aturan yang lemah, informasi covid-19 bersifat ambiguitas serta adanya sikap prasangka yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan politik. Problematika tersebut dapat dicegah melalui rekonstruksi komunikasi sosial dengan pendekatan struktural, kultural dan dialog.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Komunikasi Sosial, Pencegahan Covid-19

## **A. Pendahuluan**

Covid-19 merupakan realitas baru yang berpotensi mengancam stabilitas negara-dunia. Wabah ini telah merebak ke berbagai wilayah teritorial dengan menyerang aspek sektoral secara agresif. Virus ini menjadi bahaya laten yang mempengaruhi aktivitas sosial, sistem pendidikan, pemerintahan bahkan mempengaruhi aktivitas perekonomian melalui resesi hingga ancaman kondisi ekonomi yang krisis moneter baik secara lokal maupun global. Dilematis menjadi perhatian antar berbagai negara dalam masing-masing upaya pencegahannya di masyarakat. Sebagian negara dikategorikan berhasil menekan kurva peningkatan jumlah terpapar covid-19 di wilayahnya sementara sebagian negara lain masih dalam proses penanganan serius bahkan mengalami peningkatan jumlah penularan yang signifikan.

Di Indonesia, status grafik perkembangan covid-19 tampaknya belum dinyatakan membaik dari segi jumlah penurunan. Faktanya, kondisi penyebaran wabah justru semakin meningkat tiap saat dari angka 177,571 yang terkonfirmasi pada 1 September 2020 menjadi 291.182 terkonfirmasi pada tanggal 1 Oktober 2020.<sup>1</sup> Menurut data informasi media Indonesia telah menempati posisi keempat belas dunia dalam angka kematian akibat terpapar wabah covid-19.<sup>2</sup>

Pada sisi lain pandemi saat ini telah banyak melumpuhkan sistem sosial yang berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat sehingga menyebabkan adanya penurunan pendapatan dan kehilangan banyak pekerjaan. Sementara masa resesi menjadi keresahan sebab oleh Menteri Keuangan RI dinyatakan telah diproyeksikan sebagai *problem real* yang di hadapi oleh bangsa Indonesia sejak akhir September 2020.<sup>3</sup>

Penularan virus yang terus merambat di masyarakat juga disebabkan karena adanya faktor kedisiplinan yang lemah dan status informasi yang dilema. Aturan pemberlakuan protokol kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal oleh banyak pihak sebab adanya informasi status covid-19 di masyarakat terkesan sebagai problem yang ambiguitas, sehingga tindakan pencegahan kurang efektif. Selain hal tersebut kendala penanganan dalam upaya pencegahan penularan virus di masyarakat juga tidak dinafikan bahwa faktor utama diantaranya adalah sikap prasangka yang masih kental membentuk penetapan-penetapan *stereotype* atas kelompok lain untuk meraih keuntungan yang

---

<sup>1</sup> Satgas Penanganan Ccovid-19 Nasional, "Data Peta Sebaran Akumulasi Data Nasional," <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

<sup>2</sup> Mela Arnani, "20 Negara Dengan Kasus Aktif Corona Tertinggi, Indonesia Nomor 14," *Kompas.Com*, accessed September 28, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/28/190000965/20-negara-dengan-kasus-aktif-corona-tertinggi-indonesia-nomor-14?page=all>.

<sup>3</sup> Hendra Kusuma, "Sri Mulyani Pastikan RI Resesi Di Akhir September 2020," *DetikFinance*, accessed September 22, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5183135/sri-mulyani-pastikan-ri-resesi-di-akhir-september-2020>.

berorientasi kepada ekonomi dan politik.<sup>4</sup> hal ini paling berkesan sebagai hambatan besar dari sikap saling tidak percaya dan akan sulit mengantarkan pada titik temu.

Implementasi kebijakan atas aturan-aturan pencegahan virus di masyarakat juga kelihatannya sebagai sebuah tindakan diluar kordinasi. adanya sikap komunikasi yang terjalin secara tidak efektif sehingga terjadi *gap* di tataran pemangku kebijakan pusat dan daerah. Pemutusan aturan oleh sejumlah pemerintah daerah misalnya dalam pemberlakuan karantina wilayah atau *lockdown* secara mandiri, justru ditantang oleh pemerintahan pusat sebab kebijakan karantina wilayah dianggap merupakan wewenang dari pemerintahan pusat. Meskipun pada akhirnya disepakati penetapannya, namun sinkronisasi tampaknya tidak berlangsung baik pada integrasi otoritas struktural tersebut. Hal semacam ini dapat menjadi keresahan dan kebingungan sehingga menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Akibatnya realisasi aturan kebijakan justru mengundang perdebatan yang dapat menjadi penghalang kemasifan atas upaya-upaya lain dalam mencegah wabah covid-19 di masyarakat.

Pencegahan covid-19 di Indonesia hendaknya dimulai dengan sikap yang terbuka. Transparansi informasi dan kebijakan yang tepat sasaran oleh pemerintahan daerah maupun pusat merupakan langkah konkret yang mesti dilakukan untuk menciptakan kedamaian. Otoritas terkait dapat bertindak sebagai penengah situasi masyarakat dan mengundang partisipatif sosial untuk terlibat andil. Kesadaran atas kepentingan-kepentingan pihak tertentu dalam polemik demokrasi saat ini kelihatannya masih kuat dan telah termanifestasikan dalam berbagai bentuk yang real. Kenegarawan adalah sikap yang diimpikan sebagai suatu tindakan sadar mengakui stabilitas negara yang notabene menunjang kesejahteraan sosial untuk seluruh bangsa Indonesia adalah menjadi

---

<sup>4</sup> Syukri, "Upaya Penyelesaian Konflik Politik Di Indonesia," *Jurnal Al-Harakah* 2, no. 2 (2019): 33–46, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alharakah/article/view/6419>.

tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu kedamaian harus di bangun melalui rekonsiliasi dengan membentuk komunikasi secara akrab sebagai upaya pencegahan virus di masyarakat baik secara komunal maupun institusional.

Penelitian ini menyajikan pokok pembahasan yaitu: 1) realisasi pencegahan covid-19 di Indonesia, 2) problematika sosial di era pandemi covid-19, 3) rekonstruksi komunikasi sosial sebagai upaya pencegahan covid-19 di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi komparasi *learning experience* dengan kajian literatur. Penelitian ini bertujuan untuk sarana edukasi dengan menyajikan persoalan penanganan covid-19 di Indonesia serta upaya penyatuan masyarakat melalui rekonstruksi komunikasi sosial untuk meminimalisir konflik di masa pandemi.

## B. Pembahasan

### a. Realisasi Pencegahan Covid-19 di Indonesia

Empat bulan sejak maraknya penyebaran covid-19 di Indonesia, penanganan wabah melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sebagai perwakilan pemerintah telah merealisasikan berbagai upaya dalam menangkal penyebaran virus di masyarakat. Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi pembuatan zonasi wilayah sebagai upaya untuk mengetahui karakteristik suatu masyarakat dan daerah tertentu, penilaian mandiri, pemberian edukasi, dan sosialisasi masyarakat.<sup>5</sup> Selain hal tersebut upaya lain yang dilakukan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti *physical distancing*, *work and study form home*, *testing*, *tracking*, pembatasan kegiatan publik,<sup>6</sup> karantina kesehatan

---

<sup>5</sup> Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional, "Empat Tahapan Sosialisasi Dalam Upaya Pencegahan Bencana Di Masa Pandemi," *BNPB*, last modified 2020, accessed July 16, 2020, <https://bnpb.go.id/berita/empat-tahapan-sosialisasi-dalam-upaya-pencegahan-bencana-di-masa-pandemi>.

<sup>6</sup> Imas Novita Juaningsih, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 6 (2020): 509–518, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15363>.

hingga karantina wilayah berupa aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sejak awal penyebaran virus di Indonesia, upaya preventif dilaksanakan bermula pada persiapan sikap kesiapsiagaan yang bersandar pada prinsip penanggulangan wabah yaitu, fase pencegahan, fase deteksi dan fase respons. Pada fase pencegahan dilakukan melalui pembuatan pedoman kesiapsiagaan yang mengacu pada Undang-undang (UU) kekarantina kesehatan dan UU wabah penyakit menular. Fase ini mendukung implementasi pada tata kelola global dalam penanganan wabah seperti penyampaian informasi kesiapsiagaan ke institusi-institusi kesehatan di tingkat daerah, mendukung fasilitas sarana prasarana dan penanganan simulasi teknis. Selain itu pencegahan dioptimalkan melalui posko-posko sebagai basis komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat dalam melaksanakan pencegahan pada lingkungan kelompok dan individu.<sup>7</sup>

Fase deteksi yang dilakukan melalui sistem *surveilans* epidemiologi secara rutin dengan hasil kebijakan pemerintah dalam penanggulangan wabah diantaranya yaitu pemasangan *termoscanner* pada 135 pintu keluar masuk negara seperti pelabuhan, bandar udara, dan pos-pos lintas darat negara. Pada sisi lain dimaksimalkan melalui observasi dan karantina mandiri sebanyak 14 hari pada tiap-tiap masyarakat yang telah melakukan perjalanan dari luar negara maupun antar daerah di Indonesia serta dilakukan pengujian klinis pada pihak yang di duga *suspect*.

Fase respons telah dilakukan sejak pertama kali adanya informasi kasus dua orang ibu dan anak warga negara Indonesia terkonfirmasi terpapar covid-19. Pemerintahan pusat menerangkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan

---

<sup>7</sup> Nur Sholikhah Putri Suni, *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disiase, Info Singkat* (Indonesia, 2020), [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XII-3-I-P3DI-Februari-2020-1957.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-3-I-P3DI-Februari-2020-1957.pdf).

fasilitas penanganan terhadap virus berupa 100 rumah sakit yang mempunyai ruang isolasi sesuai standar dan perlengkapan aturan internasional yang berlaku<sup>8</sup> serta berbagai tindakan pencegahan lainnya juga diupayakan. Langkah-langkah penanganan tersebut termasuk diantaranya adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disiase* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, kemudian disahkan menjadi Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020.

Pada fase respon juga dilakukan upaya lain seperti penataan ruang publik dan ruang institusi dengan kelengkapan fasilitas keamanan sesuai protokol kesehatan, karantina wilayah yang diberlakukan oleh sebagian wilayah Indonesia termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, edukasi lembaga berwenang, *work from home*, *stay at home*, perlengkapan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan termasuk ruang isolasi bagi pasien positif, hingga pada upaya distribusi pasokan kebutuhan sosial yang melahirkan aturan ketat dan menegaskan ancaman denda sebagai konsekuensi bagi individu maupun kelompok yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan.

#### **b. Rekonstruksi Komunikasi Sosial Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Masyarakat**

Langkah utama dalam upaya pencegahan wabah saat ini mesti dimulai dengan membangun kesadaran bagi semua pihak. Bahwa kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural menjadi realitas memiliki potensi konflik yang

---

<sup>8</sup> Ardi Priyatno Utomo, "Indonesia Umumkan Kasus Pertama Virus Corona, Begini Pemberitaan Media Internasional," *Kompas.Com*, last modified 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/02/125038370/indonesia-umumkan-kasus-pertama-virus-corona-begini-pemberitaan-media?page=all>.

tinggi.<sup>9</sup> Dengan membangun pemahaman bersama akan melahirkan sikap toleransi dan saling mendukung tindakan positif satu sama lain.

Hambatan dalam upaya pencegahan virus di masyarakat tidak lepas dari problematika saat ini yang dilatarbelakangi dari dua macam aspek yaitu konflik secara ideologis dan konflik bersifat politis.<sup>10</sup> Pada konflik ideologis muncul disebabkan karena faktor adanya perbedaan persepsi antar pihak golongan dalam menyikapi kondisi pandemi saat ini. Misalnya isu oligarki yang cenderung disangkakan menjadi aktor dalam kepentingan proyek fasilitas kesehatan. Sedangkan pada konflik politis disebabkan karena adanya pertentangan yang melibatkan pembagian sumber kekuasaan seperti pada ajang demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang cenderung menjadi fokus mayoritas akibatnya banyak terjadi gesekan *stetmen* dari masyarakat konsumtif yang berasumsi bahwa prakteknya dilaksanakan tanpa mematuhi aturan protokol kesehatan.

Pihak-pihak terkait pada pelaku di lembaga struktural maupun masyarakat kultural dengan dasar kepentingan tertentu baik secara individu maupun kelompok harus dipertemukan dan dikomunikasikan secara kompak. Terciptanya ruang komunikasi antar pihak informan dengan penerima informasi dapat menjadi solusi perbaikan sehingga menjalin kedekatan komunikatif. Prinsip dasar efesiensi dalam membangun relasi sosial juga didukung pemahaman atas sikap kohesi sosial yang menetapkan perbedaan hubungan manusia dengan yang lainnya, misalnya bagaimana pengetahuan dalam hubungan manusia dengan alam dan hubungan antara manusia itu sendiri.

Membangun komunikasi melalui permulaan semua pihak dengan sikap sadar tanpa menunggu pihak lain untuk mengawali merupakan tindakan konkret.

---

<sup>9</sup> Inayatul Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016): 20–35, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/1663>.

<sup>10</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, 19th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).



Pihak otoritas terkait baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki posisi strategis dalam bertindak aktif untuk menengahi problematika di masyarakat. Secara kronologis ada beberapa strategi komunikasi yang dapat dibangun dalam menempuh upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia yaitu:

### **1. Melalui Jalur Struktural**

Jalur struktural menjadi ruang utama yang dapat merumuskan kebijakan formal sebagai tindakan yang efektif dalam menangani problematika di masyarakat. Jalur struktural yang dimaksudkan adalah kontrol atau tindak pengendalian atas sistem masyarakat berasal dari otoritas pemerintah melalui perangkat-perangkat negara berupa kekuatan hukum, pengerahan aparatur keamanan serta kebijakan-kebijakan terkait lainnya.

Dalam upaya pencegahan covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah preventif diantaranya melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Undang-undang yang berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, ada empat hal yang sekaligus dilaksanakan oleh pemerintah dalam PERPPU tersebut yaitu penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi serta antisipasi sistem keuangan. Di lain sisi pemerintah mengerahkan aparatur keamanan negara untuk mengawasi kondisi masyarakat demi efektivitas dari aturan yang dijalankan.

Pendekatan struktural ini selayaknya diperketat baik dalam ruang privat struktural dari pejabat pusat hingga ditingkat daerah maupun penerapan yang mengarah langsung ke masyarakat. Keseimbangan yang terjadi antara dua aspek tersebut dapat menjamin keutuhan interaksi bagi semua pihak baik masyarakat

maupun otoritas pemerintahan serta didukung oleh informasi yang bersifat transparansi.

Transparansi informasi dan sikap yang terbuka adalah kunci utama dalam membentuk suatu kekuatan menuju totalitas gerakan untuk menghadapi berbagai persoalan yang timbul dipermukaan pada masa pandemi saat ini. Lembaga Fungsional struktural yang tersebut diatas, hendaknya memahami bahwa kedudukannya merupakan variabel satu sama lain terdiri dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi. Oleh sebab itu apabila suatu unsur dalam sisem fungsional tersebut tidak saling memberikan sinyal positif maka akan mempengaruhi sistem kolektif dan akan menyebabkan disfungsi. Akibatnya dapat menjadi penghalang dari kemasifan aturan dan dapat mengundang keributan publik.

## **2. Melalui Jalur Kultural**

Dalam upaya menangkal bahaya penularan covid-19 di Indonesia, beberapa sarana dapat menjadi basis utama dalam melakukan komunikasi sosial kultural di masyarakat. Seperti pemanfaatan ruang-ruang keagamaan dan tempat peribadatan masyarakat. Ruang keagamaan dan tempat-tempat peribadatan menjadi salah satu titik pusat perkumpulan mayoritas masyarakat Indonesia khususnya umat muslim sebagai penganut agama terbesar di Indonesia. Sehingga lahan ini cukup strategis untuk membangun komunikasi sosial antisipasi bahaya covid-19.

Pemanfaatan di ruang keagamaan saat ini cukup efektif jika dikordinir dengan baik. hal tersebut juga sudah dilaksanakan di Indonesia dan hasilnya menunjukkan hal yang solutif seperti pada pelaksanaan puncak Gerakan Gebrak Masker Aceh (GEMA) yang dilaksanakan melalui khotib mimbar jum'at pada tanggal 4 September 2020 lalu. Kegiatan tersebut merupakan inisiasi pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota se-Aceh yang dirangkaikan dengan

aktivitas pembagian masker dan browsur terkait pentingnya menggunakan masker. Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto di Ace Besar, terdapat 3.883 masjid di seluruh Aceh dilakukan pencegahan penularan covid-19 melalui khotib jum'at dengan isi naskah materi penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan secara serentak dalam membangun kesadaran akan pentingnya memakai masker di masyarakat.<sup>11</sup>

### 3. Melalui Jalur Dialog

Jalur dialog merupakan salah satu sarana yang tepat dalam menuangkan ekspresi sosial sebagai bentuk resolusi untuk mencapai perdamaian. Pendekatan dialog juga mengutamakan pemufakatan bersama sehingga memberi ruang kepada semua pihak yang terlibat perkara untuk menyesuaikan pendapatnya demi menuju konsensus. Hal ini sejalan dengan Bosson Tibi yang mengatakan dialog merupakan langkan efektif dalam membuat pengertian untuk menegakkan perdamaian di dunia. Namun wacana seperti apa yang harus diterapkan pada dialog semacam ini? Maka mesti ada kesepakatan bersama tentang bentuk wacana yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>12</sup>

Pendekatan dialog dapat menjadi langkah strategis untuk menjembatani persoalan-persoalan yang terjadi di masa pandemi saat ini. Melalui pendekatan ini pihak-pihak yang terlibat masalah baik di tataran pejabat struktural pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat umum hendaknya dipertemukan melaui jalur dialogis. Sehingga masalah yang menjadi keresahan saat ini termasuk isu transparansi informasi dapat di perjelas dengan baik yang nantinya akan tercipta keselarasan dan pemahaman bersama untuk saling kompak dan bekerjasama dalam upaya pencegahan covid-19 di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Muhammad Fakhruddin, "Ribuan Khatib Jumat Di Aceh Sosialisasi Cegah Covid-19," *Republika*, last modified 2020, accessed September 4, 2020, <https://ihram.co.id/berita/qg50z6327/ribuan-khatib-jumat-di-aceh-sosialisasi-cegah-covid19>.

<sup>12</sup> ICMI, *Agama Dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1996).

### **C. Penutup**

Upaya penanganan covid-19 di Indonesia berlangsung sejak lama. Dimulai persiapan fase pencegahan, fase deteksi dan fase respons sebagai sikap kesiapsiagaan yang bersandar pada prinsip penanggulangan wabah. Namun upaya penanganan tersebut dinilai belum maksimal dalam penerapannya sehingga jumlah terpapar covid-19 terus meningkat di wilayah Indonesia. Diantara faktor penyebabnya, adanya kedisiplinan yang lemah terhadap aturan protokol kesehatan dan penilaian masyarakat atas disinkronisasi dan distribusi pasokan yang tidak merata dari tatataraan pemangku kebijakan serta timbulnya prasangka pada kelompok tertentu dalam memanfaatkan proyek kesehatan yang berorientasi untuk kepentingan ekonomi dan politik.

Peran pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam penanganan virus covid-19. Maka perlu terjalin komunikasi sosial yang dibentuk dalam forum tertentu melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk saling menuangkan ekspresinya secara terbuka sehingga terjadi kejelasan informasi yang ambigu dan pihak otoritas terkait dengan masyarakat mengalami kedekatan secara komunikatif demi terciptanya kebijakan yang masif. Pendekatan Komunikasi sosial terjadi melalui jalur struktural pemerintahan dalam keputusan kebijakan melalui PERPPU, hendaknya di perketat. Pendekatan kultural juga merupakan alternatif dengan memanfaatkan ruang-ruang keagamaan dalam mensosialisasikan bahaya covid-19 dan memperketat protokol kesehatan. Serta pendekatan dialogis dengan menggiatkan ruang-ruang dialog untuk menciptakan keselarasan pemahaman terhadap masalah-masalah yang tengah terjadi di musim pandemi saat ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arnani, Mela. "20 Negara Dengan Kasus Aktif Corona Tertinggi, Indonesia

- Nomor 14.” *Kompas.Com*. Accessed September 28, 2020.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/28/190000965/20-negara-dengan-kasus-aktif-corona-tertinggi-indonesia-nomor-14?page=all>.
- Fakhrudin, Muhammad. “Ribuan Khatib Jumat Di Aceh Sosialisasi Cegah Covid-19.” *Republika*. Last modified 2020. Accessed September 4, 2020.  
<https://ihram.co.id/berita/qg50z6327/ribuan-khatib-jumat-di-aceh-sosialisasi-cegah-covid19>.
- ICMI. *Agama Dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1996.
- Imas Novita Juaningsih, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan NurIrfan. “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 7, no. 6 (2020): 509–518.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15363>.
- Kusuma, Hendra. “Sri Mulyani Pastikan RI Resesi Di Akhir September 2020.” *DetikFinance*. Accessed September 22, 2020.  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5183135/sri-mulyani-pastikan-ri-resesi-di-akhir-september-2020>.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. 19th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nasional, Satgas Penanganan Ccovid-19. “Data Peta Sebaran Akumulasi Data Nasional.” Last modified 2020. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.
- Nasional, Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas. “Empat Tahapan Sosialisasi Dalam Upaya Pencegahan Bencana Di Masa Pandemi.” *BNPB*. Last modified 2020. Accessed July 16, 2020. <https://bnpb.go.id/berita/empat-tahapan-sosialisasi-dalam-upaya-pencegahan-bencana-di-masa-pandemi>.
- Suni, Nur Sholikhah Putri. *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disiase. Info Singkat*. Indonesia, 2020.  
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info Singkat-XII-3-I-](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XII-3-I-)

P3DI-Februari-2020-1957.pdf.

Syukri. “Upaya Penyelesaian Konflik Politik Di Indonesia.” *Jurnal Al-Harakah* 2, no. 2 (2019): 33–46.

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alharakah/article/view/6419>.

Ulya, Inayatul. “Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia.” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016): 20–35.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/1663>.

Utomo, Ardi Priyatno. “Indonesia Umumkan Kasus Pertama Virus Corona, Begini Pemberitaan Media Internasional.” *Kompas.Com*. Last modified 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/02/125038370/indonesia-umumkan-kasus-pertama-virus-corona-begini-pemberitaan-media?page=all>.